

Penerapan Pola dan Sistem Komunikasi Dalam Pengendalian, Pengelolaan dan Aktualisasi Badan Kerjasama Antarumat Beragama (BKSAUA) Sulawesi Utara

N. Kenda

Peneliti Madya Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Manado
(Makalah diterima tanggal 12 September 2011 – Revisi tanggal 7 November 2011)

Abstrak

Eksistensi agama, termasuk supra-struktur agama yang terdiri dari pesan-pesan berwujud simbol, citra, kepercayaan, dan nilai-nilainya yang spesifik, selalu diinterpretasikan manusia secara berbeda sesuai kehidupan masyarakat. Eksistensi, dinamika dan peran BKSAUA Sulawesi Utara ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dilakukan pengkajian khususnya tentang pola-pola dan sistem komunikasi yang diaplikasikan dalam menjalankan roda organisasi dalam mencapai tujuannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni paradigma induktif dalam kategori kualitatif naturalistik dengan penentuan informan secara purposive berjumlah 14 orang terdiri dari pengurus BKSAUA Sulawesi Utara dan pengurus organisasi agama se-Sulawesi Utara. Dengan hasil: eksistensi BKSAUA Sulawesi Utara sebagai komunikator, motivator, dinamisator, katalisator dan stabilisator kerukunan dengan menerapkan pola dan sistem komunikasi organisasi kecil secara intern dan secara organisasi menerapkan kombinasi pola dan sistem komunikasi horizontal-vertikal dalam informal-formal yang menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kekeluargaan dalam melaksanakan aktualisasi operasional kegiatannya.

Kata kunci: *pola, sistem komunikasi, BKSAUA Sulawesi Utara, umat beragama*

Abstract

The existence of religion, including the supra-religious structures that consist of shape symbol messages, images, beliefs, and values of specific, human beings are always interpreted differently according to people's lives. Existence, the dynamics and the role BKSAUA North Sulawesi has a special attraction to do the assessment, particularly about the patterns and communication system that applied in the wheel doing organization in achieving its objectives. The methodology approach used in this research paradigm that is inductive in naturalistic qualitative categories with informants in a purposive determination amounted to 14 people consisting of administrators BKSAUA North Sulawesi religious organizations. The results showed that; existence BKSAUA North Sulawesi as a communicator, motivator, dynamist, catalysts and stabilizers harmony by applying patterns and systems of internal communication in small organizations and organizations implementing a combination of patterns and horizontal-vertical communication system with the informal-formal, which apply the principle BKSAUA North Sulawesi equality and brotherhood in the implementation of operational activities.

Keyword: *patterns, communications systems, BKSAUA North Sulawesi, religious people*

PENDAHULUAN

Agama merupakan salah satu karakteristik sosial, agama juga merupakan salah satu bagian dari kehidupan sosial manusia yang universal, dalam artian bahwa semua pemeluk agama mempunyai pemahaman, cara berpikir, berkomunikasi dan pola perilaku tersendiri sementara mereka harus hidup di antara pemeluk agama lain. Permasalahan yang mendasar dari perbedaan agama adalah bagaimana orang yang berbeda agama ini mendefinisikan atau mengomunikasikan diri mereka di tengah agama-agama lain dalam membangun kehidupan sosial bersama.

Eksistensi agama, termasuk supra-struktur agama yang terdiri dari pesan-pesan berwujud simbol, citra, kepercayaan, dan nilai-nilainya yang spesifik, selalu diinterpretasikan manusia secara berbeda sesuai kehidupan masyarakat. Oleh karenanya agama juga mengandung komponen ritual, maka sebagian agama tergolong dalam struktur sosial bahkan budaya suatu masyarakat. Ada hubungan yang erat antara agama dengan struktur sosial dan budaya pemeluk agama tersebut, sehingga antara masyarakat yang satu dengan yang lain tak terhindarkan berinteraksi atau berkomunikasi di antara mereka. Di sisi lain, persoalan agama di masyarakat Indonesia sering menjadi hulu kekisruhan, sebut saja kasus Poso, Maluku, Maluku Utara, dan daerah lainnya, kesalahpahaman sering tak terelakkan hingga meluas menjadi konflik horizontal. (Departemen Agama RI, 1997: 16).

Fenomena inilah yang menjadi salah satu acuan para ulama Sulawesi Utara kemudian mengadakan muktamar alim ulama se-Sulawesi Utara. Salah satu penekanan isu tentang kondisi ketika menteri agama KH. M. Dachlan dalam sambutan pembukaan Musyawarah 30 November 1967 menyatakan; adanya kerukunan antargolongan agama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi, oleh karena itu, kami mengharapkan dengan sungguh adanya kerjasama antara pemerintah

dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini (*handouts* BKSAUA Sulut, 2007: 3).

Secara sosiologis, data kependudukan Sulawesi Utara adalah daerah yang masyarakatnya pluralis agamanya dari 2.420.328 jiwa penduduknya yang tersebar di sebelas kabupaten dan empat kota, tercatat 1.512.829 (62.51%) jiwa pemeluk agama Kristen Protestan, 732.409 (30.26%) jiwa agama Islam, 155.218 (6.41%) jiwa Katolik, 10.918 (0.45%) jiwa Hindu, 8.156 (0.34%) jiwa pemeluk Buddha dan 798 (0.03%) jiwa pemeluk agama Kong Hu Chu (Sulut Dalam Angka, 2009: 3). Kondisi kependudukan ini, membuka peluang terjadinya ketidak harmonisan atau konflik horizontal. Namun sebaliknya iklim kondusif masyarakat Sulawesi Utara di tengah perbedaan agama yang dianut, membuktikan bahwa peran yang dimainkan BKSAUA sebagai mitra pemerintah ikut memberi warna dan manfaat positif dalam mendorong terjaminnya ketenteraman kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Eksistensi, dinamika dan peran BKSAUA Sulawesi Utara ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dilakukan pengkajian khususnya tentang pola-pola dan sistem komunikasi yang diaplikasikan dalam menjalankan roda organisasi dan manajemen dalam merencanakan, menjalankan program, mencapai tujuan untuk mempertahankan dan membangun kerukunan hidup beragama masyarakat Sulawesi Utara melalui kerjasama antarumat bergama yang ada.

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang diuraikan di atas maka yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana keberadaan atau eksistensi badan kerjasama antarumat beragama (BKSAUA) Sulawesi Utara?
2. Bagaimana penerapan pola dan sistem komunikasi dalam pengendalian, pengelolaan dan aktualisasi BKSAUA Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya?
3. Bagaimana respon BKSAUA terhadap gangguan toleransi/kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat?

Tujuan penelitian ini adalah upaya untuk menemukan realitas yang ada, yaitu:

1. Mengidentifikasi keberadaan atau eksistensi BKSAUA Sulawesi Utara.
2. Menganalisis penerapan pola dan sistem komunikasi dalam pengendalian dan aktualisasi BKSAUA Provinsi Sulawesi Utara dalam mengomunikasikan tujuannya.
3. Menganalisis respon BKSAUA terhadap gangguan toleransi/kerukunan umat beragama di masyarakat.

Maksud penelitian ini, agar dapat memberikan pemahaman teoretis yang berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya peran komunikasi yang dimainkan oleh BKSAUA Sulawesi Utara dalam penataan kerjasama kehidupan antarumat beragama. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bukti-bukti empiris yang dapat berguna sebagai bahan masukan untuk kebijakan dan pengembangan kerukunan dari pimpinan umat beragama, pemerintah daerah, pusat, lembaga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam membina dan menciptakan kebersamaan, kerukunan kehidupan antarumat beragama.

LANDASAN KONSEP

Pluralisme Agama dan Toleransi

Secara sosiologis, pluralisme agama merupakan suatu realitas bahwa masyarakat adalah berbeda-beda dalam hal beragama. Ini adalah kenyataan sosial sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi. Pengakuan terhadap adanya pluralisme agama secara sosiologis ini merupakan pluralisme yang paling sederhana, karena pengakuan ini tidak berarti mengizinkan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau etika dari agama lain.

Mukti (1970) menjelaskan bahwa ada beberapa pemikiran diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. Pertama, *sinkretisme*, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Kedua, *reconception*, yaitu menyelami dan meninjau kembali

agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. Ketiga, *sintesis*, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambil dari pelbagai agama, supaya tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama *sintesis* (campuran) itu. Keempat, penggantian, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang berlainan agama, masuk dalam agamanya. Kelima, *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan. Effendi (1978) tentang pluralisme agama berbeda dengan pluralisme Mukti di atas, pengakuan pluralisme bukan hanya pengakuan secara sosiologis bahwa umat beragama berbeda, tetapi juga pengakuan tentang titik temu secara teologis di antara umat beragama. Effendi tidak setuju dengan absolutisme agama, ia membedakan antara agama itu sendiri dengan keberagamaan manusia. Pengertian antara agama dan keberagamaan harus dipahami secara proporsional. Menurutnya, agama terutama yang bersumber pada wahyu, diyakini sebagai bersifat *ilahiyyah*, agama memiliki nilai mutlak. Namun, ketika agama itu dipahami oleh manusia, maka kebenaran agama itu tidak bisa sepenuhnya ditangkap dan dijangkau oleh manusia, karena manusia sendiri bersifat nisbi (*relative*). Oleh karena itu, kebenaran apapun yang dikemukakan oleh manusia termasuk kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia bersifat nisbi, tidak absolut. Kebenaran absolut itu hanya bisa diketahui oleh ilmu Tuhan (Majalah Prisma No. 5, Juni 1978, hal. 16).

Halim (2008) dalam artikel yang berjudul "Menggali Oase Toleransi", menyatakan "toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerantia*, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran". Secara umum, istilah ini mengacu pada sikap

terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. (<http://anselboto.blogspot.com>). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi didefinisikan sebagai sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Komunikasi, Pola, dan Sistem Komunikasi

Dalam kehidupan masyarakat, manusia selalu berhubungan. Bertolak dari hubungan tersebut maka timbullah interaksi sosial (*social interaction*). Interaksi sosial dapat terjadi karena adanya interkomunikasi (*inter communication*) di antara individu yang bertemu. Komunikasi antar manusia merupakan ciri pokok manusia sebagai makhluk sosial dalam tingkat kehidupan yang sederhana, maupun dalam tingkat tata pergaulan yang lebih kompleks (DeVito 1997: 213). Proses komunikasi terjadi karena ada pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Komunikan dalam menanggapi pesan tersebut memberi respon (*feedback*) kepada komunikator dan sebaliknya. Komunikasi dalam kaitannya dengan hubungan kerja sebagaimana disampaikan Sugandha dalam Muhammad (1995: 36) bahwa “Tanpa komunikasi tidak mungkin kerjasama antar manusia dapat terbentuk. Bahkan tidak mungkin kewenangan dan tugas dapat dijalankan”. Dari pendapat tersebut terlihat bahwa peranan komunikasi sangat penting dalam organisasi.

Dalam organisasi pola komunikasi dikelompokkan menjadi saluran komunikasi formal dan nonformal. Dalam kaitannya dengan proses penyampaian informasi dari pimpinan kepada bawahan ataupun daripada manajer kepada karyawannya, pola transformasinya dapat berbentuk komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal dan komunikasi lintas saluran (Muhammad, 1995: 35). Komunikasi sebagai sistem, oleh Semprivo dalam Cangara (1998: 55) mendefinisikan sebagai suatu aktivitas di mana semua komponen atau unsur

yang mendukungnya saling berinteraksi satu sama lain dalam menghasilkan luaran. Layaknya sebagai sebuah organisasi, BKSAUA dalam berkomunikasi, dimungkinkan menerapkan pola dan sistem komunikasi walau akan beragam menurut sifat dan tujuannya. Black & Whitney dalam Sule dan Saefulah (2005: 42) memformat dua pola komunikasi dalam organisasi di mana BKSAUA sebagai sebuah organisasi dapat saja terjadi pola komunikasi yang menganut komunikasi vertikal horizontal dan komunikasi formal informal sebagai sebuah organisasi.

Komunikasi horizontal oleh Muhammad (1995:121) terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Komunikasi horizontal muncul paling sedikit karena lima alasan untuk mengoordinasikan penugasan kerja; 1). Berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan. 2). Untuk memecah masalah. 3). Untuk memperoleh pemahaman bersama. 4). Untuk mendamaikan, berunding dan menengahi perbedaan. 5). Untuk menumbuhkan dukungan antarpersonal.

Komunikasi Dalam Organisasi

Manusia pada hakikatnya merupakan mitra bagi yang lainnya selalu cenderung hidup berkelompok atau berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai seorang diri. Efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusianya. Hubungan atau komunikasi dalam organisasi menciptakan harapan-harapan bagi perilaku individu dan kelompok. Pemimpin harus dapat memengaruhi dan memotivasi anggota agar secara bekerjasama mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi dengan kinerja yang unggul, sehingga perlu dikembangkan sistem komunikasi organisasi yang efektif. Karena pimpinan atau seseorang tidak dapat mengatur anggotanya dan pengurusnya tanpa berkomunikasi. Jerry (1977: 90), berpendapat, “Semakin dekat seseorang kepada pusat kontrol organisasi dan pembuatan keputusan, maka semakin tegas penekanan terhadap

pertukaran informasi.”, jelasnya dalam pengamatan tersebut bahwa pekerjaan manajer/pimpinan sangat terlibat di dalam komunikasi organisasi. Pada level masyarakat, terjadi pola-pola komunikasi dalam wilayah komunikasi sosial yang cukup didominasi oleh komunikasi kelompok. Rakhmat (1989: 160) menyatakan dalam masyarakat terdapat kelompok dikotomi, yaitu: Kelompok Primer-Sekunder, kelompok *Ingroup-Outgroup*, kelompok rujukan keanggotaan–bukan kelompok dan kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif.

Idealnya BKSAUA sebagai sebuah lembaga yang aktif melaksanakan tugasnya berkomunikasi sehingga ia akan menjalani operasional kegiatannya dan terjadi pola dan sistem komunikasi dengan alur informasinya sebagaimana alur atau sistem mulai dari komunikator/sumber hingga ke komunikan/tujuan. Pada sisi proses, informasi akan dipengaruhi oleh kredibilitas personal (jabatan dan kewenangan) maupun urgensi/kepentingan informasi. Pada sisi pemakatan informasi akan dipengaruhi oleh daya tarik, urgensi informasi, sedang untuk penyaluran/pengiriman informasi sering akan mengalami (*noise*) keaburan. Inti informasi terletak baik tidaknya saluran dan untuk penerima informasi akan dipengaruhi oleh kemampuan pemahaman SDM (pendidikan).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni paradigma induktif dalam kategori kualitatif naturalistik. Paradigma ini mengacu pada Harmon dalam Moleong (2009: 49) sebagai cara mendasar untuk mempersepsikan, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan suatu cara khusus melihat realitas.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara dengan sasaran mereka yang terkait langsung dengan organisasi BKSAUA Provinsi Sulawesi Utara di mana sekretariatnya bertempat di Kantor Gubernur kota Manado, dipilih sebagai sasaran penelitian dengan pertimbangan: 1. Lokasi tersebut merupakan pusat kegiatan

pemerintahan, lembaga keagamaan dan kemasyarakatan di mana merupakan tempat aktivitas dari subjek penelitian. 2. Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara merupakan pusat pemerintahan di mana institusi BKSAUA Sulawesi Utara beraktivitas dan berinteraksi dengan pemerintah dan masyarakat yang hidup dalam pluralisme agama dan sosial budaya.

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan demikian yang menjadi fokus atau perhatian dalam penelitian ini adalah menelusuri atau mempelajari bagaimana eksistensi, pola dan sistem komunikasi serta *feedback* BKSAUA Sulawesi Utara dalam mengomunikasikan konsep, program, ekspektasi, motivasi, kebijakan/keputusan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dengan indikator: 1). Eksistensi BKSAUA Sulawesi Utara. 2). Aspek pola dan sistem komunikasi dalam organisasi. 3). Dengan pemerintah Provinsi dan antar lembaga/institusi terkait.

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus BKSAUA Sulawesi Utara dan pengurus organisasi agama/tokoh agama provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah 14 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dalam kategori non probabilitas.

Teknik pengumpulan datanya adalah 1. studi dokumentasi, penelitian kepustakaan (*Library research*), 2. Penelitian Lapangan (*field Research*) 3. Observasi (*observation*).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksistensi BKSAUA Sulawesi Utara

BKSAUA Sulawesi Utara dalam menjalankan tugasnya melangsungkan musyawarah, rapat, penyuluhan, pelatihan dan konsultasi serta diskusi-diskusi dalam rangka meningkatkan interaksi positif para tokoh-tokoh/pimpinan umat beragama se-Sulawesi Utara baik dalam upaya melakukan motivasi tindakan *kuratif/problem solving*,

maupun *preventif*/pencegahan untuk menangkal berbagai akses dan ekses di masyarakat demi terjaminnya lingkungan yang kondusif di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Landasan semangat visi dan misi BKSAUA tidak berdiri sendiri tapi terintegrasi dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi, yaitu: terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang modern dan agamis. Dengan demikian, BKSAUA Sulawesi Utara merupakan sebuah organisasi mitra penting Pemerintah Provinsi dalam mendekati diri dengan permasalahan kemasyarakatan secara khusus membina kehidupan beragama untuk berdampingan tanpa perbedaan dan kecurigaan.

Apresiasi terhadap BKSAUA Sulawesi Utara, sebagai sebuah lembaga/organisasi sebagai media yang dapat meredam kerawanan-kerawanan gangguan kerukunan. Kerukunan yang dikawal BKSAUA berarti hidup berdampingan saling mengakui, menerima, terbuka, BKSAUA diapresiasi sebagai kendaraan komunikatif yang nyaman membawa pimpinan umat beragama dalam menciptakan lingkungan kondusif rukun dan damai.

BKSAUA diapresiasi pula sebagai media usaha menciptakan harmonisasi antarumat beragama dengan umat beragama lainnya, maupun antarumat beragama dengan pemerintah dalam prinsip saling menghormati dan menghargai. Manajemen dan organisasi BKSAUA Sulawesi Utara, demi kelangsungan organisasi selain adanya kepentingan dan kepedulian Pemerintah Provinsi dalam memberdayakan semua potensi pembangunan baik lembaga dan institusi kemasyarakatan yang ada termasuk bermitra dengan BKSAUA, terus dibangun hubungan fungsional dengan komunikasi yang harmonis sebagai fasilitator dalam menjalankan roda organisasi.

Keunggulan atau kekuatan BKSAUA Sulawesi Utara, yaitu sebagai sebuah lembaga kearifan lokal menjadi modal dalam memperkuat karakteristik otonomi daerah sebagai bagian dari karakteristik masyarakat Sulawesi Utara, lahir dari cerminan budaya masyarakat Sulawesi Utara. Kelemahan

BKSAUA secara organisasi dan manajemen, sebagai institusi mitra khusus Pemerintah Provinsi, terkesan tidak mandiri menjalankan visi misi yang inklusif dengan pemerintah provinsi Sulawesi Utara. BKSAUA tidak mempunyai otoritas penuh secara organisasi, Secara kasat mata menempati ruangan kurang strategis yang jauh dari pengenalan publik yang dapat dimaknai lembaga ini adalah lembaga pemerintah sebab menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi. Secara administratif kepala sekretariatnya seorang eselon III bernomenklatur Kepala Bagian Fasilitas Sosial dan Keagamaan terkesan ambivalen mempunyai tugas rangkap dengan organisasi induknya Biro Kesejahteraan Sosial pada Setda Provinsi Sulawesi Utara. BKSAUA Provinsi hanya eksis dengan Surat Keputusan Gubernur dalam arti ketika pergantian kepemimpinan Gubernur selanjutnya, dapat saja ia tidak eksis atau tidak dibutuhkan lagi.

Posisi regulasinya lemah sebab dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengembangan organisasi, penggerakan, pengawasan untuk jangka panjang yang berkesinambungan akan terus bergantung pada visi misi dan *budget* Pemerintah Provinsi yang tampak sebagai majikannya, sedangkan tugas yang diembannya sangat strategis dalam menciptakan iklim kondusif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Informan berharap agar BKSAUA terus menjadi jembatan dalam menjalin dan menjalankan kehidupan beragama, mengutamakan kebersamaan dan menjadikan kerukunan di atas segalanya. BKSAUA ke depan akan menjadi kanal dan tumpuan dalam penyelesaian ketika terjadi masalah gangguan kerukunan di masyarakat. Tantangan yang dihadapi BKSAUA Sulawesi Utara dalam mempertahankan suasana kondusif bukan hal yang mudah, namun membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh komponen agama dan masyarakat.

Pola dan Sistem Komunikasi Intern BKSAUA Sulawesi Utara

Pola dan sistem komunikasi BKSAUA

Sulawesi Utara secara internal menerapkan pola komunikasi kelompok kecil dengan pola dan sistem komunikasi rantai atau bersambung, pola bintang atau menyeluruh dan pola roda. Secara organisasi BKSAUA Sulawesi Utara menganut pola dan sistem perpaduan antara horizontal-vertikal dengan pola formal-informal.

BKSAUA Sulawesi Utara secara teoretis dan empiris telah mengacu pada: 1) Pola dan sistem komunikasi bersambung atau sistem rantai. 2) Pola sistem komunikasi menyeluruh atau bintang. 3) Pola dan sistem roda. Sedangkan secara organisasi menerapkan komunikasi sistem terbuka. Terjadi kombinasi antara pola dan sistem komunikasi horizontal-vertikal dengan pola dan sistem komunikasi formal-informal. Maksudnya ialah bahwa pola dan sistem komunikasi yang dibangun tidak terikat pada satu pola sistem saja, sebab BKSAUA Sulawesi Utara konsisten dalam menjalankan tata tertib sebagai pedoman tata laksana organisasi dan fleksibel dalam menerapkan pola dan sistem komunikasi dengan metode dan teknik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

Manajemen BKSAUA Sulawesi Utara menganut sistem terbuka yang mengembangkan arus komunikasi horizontal dengan pimpinan umat beragama bersama pemerintah, intitusi terkait dan lembaga-lembaga agama sebagai partner serta membuka diri sebagai lembaga konsultatif yang menganut pola sistem komunikasi vertikal dikombinasikan dengan pola sistem formal-informal sebagai sebuah pendekatan dengan teknik persuasif secara timbal balik dengan publik atau akar rumput (inisiatif-mutualisme). BKSAUA Sulawesi Utara juga telah mengembangkan atau membangun hubungan fungsional secara koordinatif dengan lembaga terkait (BKSAUA Kabupaten/Kota hingga desa kelurahan bersama aparatnya jika dibutuhkan).

Metode atau teknik komunikasi yang digunakan dalam operasionalnya BKSAUA Sulawesi Utara menggunakan bentuk komunikasi kelompok yang aktif dengan: a) rapat, b) diskusi/panel, c) dialog/interaktif, d) anjingsana, e) rapat pleno, f) seminar, g)

workshop/lokakarya, h) musyawarah/konferensi/muktamar, dan i) parlementaria. Alat atau instrumen komunikasi yang banyak digunakan dalam melangsungkan komunikasi adalah komunikasi oral (bercakap/bicara), telepon genggam (*handphone*) dengan bicara dan SMS, telepon rumah, surat, undangan, laporan tertulis, informasi dari mitra kerja, lembaran program kerja, isu gangguan kerukunan, dan atau kepentingan organisasi/manajemen lainnya.

Konstruksi pola dan sistem komunikasi dalam penggodokan program BKSAUA Sulawesi Utara, dalam melaksanakan aktivitas melalui beberapa tahapan; Konstruksi pola dan sistem komunikasi BKSAUA dengan pemerintah, konstruksi posisi BKSAUA sebagai mitra Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk memberikan masukan atau saran kepada Gubernur berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kerukunan antarumat beragama di Sulawesi Utara, mempunyai garis hubungan yang kuat. Artinya bahwa semua hasil kegiatan yang dilakukan BKSAUA berkaitan dengan kerukunan akan banyak bermuara pada Pemerintah Provinsi sebagai pembina publik. Untuk menghasilkan produk atau materi yang menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Provinsi tentunya berkait dengan isu diduga akan mengganggu kerukunan antarumat beragama ataupun berimplikasi pada gangguan masyarakat pada umumnya.

BKSAUA bekerja mulai dari adanya isu hingga penerbitan saran atau bahan masukan kepada Gubernur. Selebihnya adalah berlangsung komunikasi biasa secara administratif sebagaimana layaknya sebuah organisasi, seperti merespon berbagai surat masuk serta menghadiri berbagai undangan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Konstruksi pola dan sistem komunikasi BKSAUA dengan lembaga/institusi terkait, BKSAUA Sulawesi Utara tidak saja terbatas membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi, namun ia menganut sistem tidak terbatas atau multilevel, maka lembaga ini tidak luput dari adanya komunikasi ke berbagai lini seperti, ke BKSAUA kabupaten/kota, BKSAUA kecamatan atau

desa/kelurahan, namun hubungan ini bukan hubungan struktur atau hierarki tapi bersifat koordinatif fungsional, sebagai upaya memperkuat jaringan dan menghormati kewenangan masing-masing namun mempunyai arti dalam merumuskan kebijakan atau mendukung tupoksi. Pola dan sistem komunikasi juga dibangun dengan lembaga-lembaga keagamaan dalam koordinasi perwakilan presidium dan anggota di BKSAUA sebagai bagian dari pembangunan komunikasi berjaringan kepada organisasi keagamaan (MUI Sulut, Sinode GMIM, Keuskupan Manado, Sinode KGPM, Kantor Wilayah Konferensi Advent Hari ke tujuh, Majelis Daerah GPDI Sulut, Divisi Gereja Bala Keselamatan, Walubi Sulut dan Hindu Dharma Sulawesi Utara) hingga ke komunitas akar rumput.

Bangunan komunikasi lainnya dengan media massa seperti radio, televisi maupun surat kabar walau hanya bersifat pasif namun BKSAUA Sulawesi Utara terus membuka diri apalagi dengan pers sebab komunikasi dengan media penting dibangun dengan prinsip mutualisme (saling menghidupkan) sebagai upaya mempermudah sosialisasi maupun diseminasi atas berbagai kebijakan maupun masalah-masalah penting yang dilakukan BKSAUA Sulawesi Utara dalam kaitan dengan membangun dan memperkuat keharmonisan kerukunan antarumat bergama. Pola dan sistem komunikasi yang berlaku adalah pola dua siklus, yakni hubungan kerjasama dan koordinatif fungsional, di mana alur komunikasinya tampak *linear* dari sentral BKSAUA dalam gerakan sebagian tidak terikat, menggunakan bentuk komunikasi kelompok, dengan metode rapat, diskusi, dialog, konferensi pers, musyawarah, *workshop*/lokakarya yang menghasilkan keputusan bentuk berbagai dokumen, rumusan/konsep kerukunan untuk lembaga agama dan masyarakat Sulawesi Utara.

Respon BKSAUA Terhadap Gangguan Toleransi

Salah satu program dan kegiatan BKSAUA Sulawesi Utara adalah terus

melakukan monitoring dan memantau kondisi kehidupan bermasyarakat pada umumnya, sehingga secara kontinyu terus memperhatikan dan merespon berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Apabila ada masalah terinformasikan ke BKSAUA Sulawesi Utara atau belum namun terekspos di media, dapat dijadikan alternatif informasi sebagai bagian dari sikap kewaspadaan, lebih lagi bila telah terkomunikasikan dari fasilitator (pelindung) BKSAUA Sulawesi Utara maka respon terhadap masalah tersebut dilakukan dengan pola dan sistem; berkomunikasi dengan BKSAUA Kabupaten/Kota untuk konfirmasi peristiwa, sambil melakukan anjangan (bila diperlukan) berkoordinasi secara fungsional dengan alat kelengkapan lainnya seperti fasilitator pelindung dan yang terkait untuk mendapatkan informasi dari kondisi riil demi perumusan solusi yang mendekati harapan dalam penyelesaiannya. Selanjutnya mengundang seluruh presidium dan anggota (bahkan telah saling berkomunikasi sebelumnya melalui telepon atau SMS) untuk mengadakan rapat menyikapi dan mengantisipasi berkembangnya masalah, hasil rapat langsung diplenokan dijadikan dokumen saran/masukan kepada Pemerintah Provinsi selanjutnya dikomunikasikan kepada Gubernur selaku Pembina publik.

Sumber informasi yang digunakan BKSAUA untuk memperoleh informasi berbagai gangguan kerukunan atau eksek di masyarakat, yaitu: melalui media massa jika diberitakan, atau dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai pembina masyarakat. Sumber yang tidak kalah kuat validasinya dari pihak pengawal keamanan dan Kamtibmas seperti kepolisian sebagai salah satu mitra dalam posisi sebagai fasilitator pelindung BKSAUA Sulawesi Utara. Mitra kuat lainnya sebagai sumber informasi adalah kalangan pimpinan agama melalui jalur organisasi keagamaan yang ada di semua jenjang hingga ke pimpinan agama di lokasi peristiwa atau kunjungan langsung dari pimpinan agama setempat dari lokasi. Untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi,

BKSAUA Provinsi akan berkordinasi dengan BKSAUA kabupaten/kota, kecamatan/desa/kelurahan setempat. Jika itu melalui jaringan yang telah terbina, informasinya akan langsung diterima dan dalam menggalang informasi dari sumber lebih mengutamakan komunikasi dua arah melalui alat komunikasi telepon atau SMS. Lainnya dilakukan melalui tatap muka berdialog atau interaksi langsung di lapangan. Mudahnya personil BKSAUA Sulawesi Utara melakukan komunikasi, selain jaringan itu telah terjalin namun yang tak kalah menarik, lembaga ini terus mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan komunikatif persuasif dalam melakukan pendekatan dengan institusi atau lembaga manapun dan komunitas agama manapun. Hal inilah antara lain yang menyebabkan lembaga ini belum pernah menghadapi resistensi ataupun penolakan yang berarti di lapangan. Dengan demikian, dimaknai bahwa BKSAUA Sulawesi Utara menggunakan semua jaringan informasi demi mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat ketika menelusuri peristiwa atau eksese yang terjadi di akar rumput.

Pola dan sistem komunikasi BKSAUA dalam penanganan gangguan kerukunan dan penyaluran solusi/kebijakan ke masyarakat, gangguan keamanan apapun oleh Pemerintah selalu diusahakan agar segera mungkin diselesaikan. Walaupun pemerintah mempunyai alat keamanan namun tentunya cara penyelesaian persuasif dan komunikatif, BKSAUA lebih menjadi rujukan profesional dapat dipertimbangkan sebagai solusi alternatif. BKSAUA sebagai sebuah lembaga atau organisasi yang dijadikan pemerintah sebagai mitra, selalu aktif memantau dan memperkuat pencitraan iklim kehidupan masyarakat yang rukun, solid, mandiri dan harmonis. BKSAUA menerapkan pola dan sistem komunikasi gabungan pola vertikal-horizontal dengan formal dan informal dan terjadi komunikasi yang berarah pada solusi penyelesaian masalah, di mana alur komunikasinya bergerak dari sentral BKSAUA dengan arah panah, menggunakan bentuk komunikasi kelompok, dengan metode rapat, diskusi, berdialog, anjangsana, telaah isu, dan menghasilkan keputusan alternatif

solusi penyelesaian masalah pada akar rumput atau masyarakat.

KESIMPULAN

Secara prinsipil eksistensi BKSAUA Sulawesi Utara mempunyai peran eksklusif sebagai mitra penting Pemerintah Provinsi dalam menjaga dan mengawal kerjasama kerukunan hidup antarumat bergama.

Apresiasi terhadap institusi sebagai pengawal kerjasama antarumat beragama, peredam kerawanan, pengendali kerukunan inklusif dalam pluralitas yang toleran terhadap keragaman. Secara organisasi dan manajemen dari studi yang dilakukan.

Pola dan sistem komunikasi BKSAUA Sulawesi Utara terbangun atas rujukan budaya dan tuntutan manajemen dalam menjalankan roda organisasi mencapai tujuannya dengan menganut prinsip komunikasi kesetaraan antarumat beragama dalam atmosfir persaudaraan.

Respon BKSAUA Sulawesi Utara dalam menangani berbagai gangguan toleransi kerukunan di masyarakat berjalan secara *koordinatif* dengan BKSAUA kabupaten/ kota hingga ke kelurahan dan desa secara fungsional konsultatif non hierarki, bermakna responsif dan tanggap menjadi respon positif dalam penguatan domain citra kerukunan di Sulawesi Utara.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran :

BKSAUA Sulawesi Utara sebagai aset kearifan lokal sangat strategis hadir memperkuat otonomi daerah secara dinamis telah berkontribusi dalam mengawal kerukunan di Sulawesi Utara selama 41 tahun, seyogyanya lembaga ini dapat menjadi lembaga permanen milik semua golongan umat beragama yang didukung oleh sebuah komitmen regulasi dengan dukungan fasilitas mandiri dari seluruh komponen masyarakat pecinta kerukunan Sulawesi Utara sehingga BKSAUA Sulawesi Utara benar-benar tanggap, profesional, demokratis, akomodatif, komunikatif, persuasif yang elegan.

BKSAUA Sulawesi Utara telah mendorong masyarakat mencintai kehidupan

yang toleran, rukun, aman, dan damai sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Sulawesi Utara yang dikenal sebagai *the land of smiling people*, sudah sepantasnya pemerintah daerah Sulawesi Utara menjadikan sebagai *icon profile* (maskot) masyarakat Sulawesi Utara yang cinta damai toleran dan rukun dapat dipromosikan dan dipajang di tempat-tempat strategis untuk dikenang oleh wisman maupun wisnu sekaligus menjadi media promosi kerukunan di Sulawesi Utara. Untuk lebih memperluas pengenalan peran dan eksistensi BKSAUA Sulawesi Utara ke depan perlu melakukan program-program *soft skill* (keterampilan lunak) bagi pengurus atau komunikator dan motivator BKSAUA Sulawesi Utara sebagai tuntutan dalam mengukur dan akuntabilitas kinerjanya. Dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan teknologi komunikasi informasi, penting untuk segera membangun situs *website* yang dapat diakses secara global demi mengenal apa dan siapakah BKSAUA Sulawesi Utara itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Cangara, H. 1998. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- DeVito, J. 1997. *Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta : *Professional Books*.
- Jerry, C.W. 1977. *Organizational Communication The Keystone To Managerial Effectiveness*. International Student Edition. by McGraw-Hill Inc.
- Muhammad, A. 1995. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution, 1996. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Purwasito, A. 2003. *Komunikasi Multikultural*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rakhmat, J. 1989. *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Sule, E.T. dan K. Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.

Sumber- Sumber lain :

Majalah :

- Effendy, Dj. 1978. "Berdialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?" *Majalah Prisma* 5, Juni 1978, hal. 16.
- Mukti, A. 1970, "Berdialog between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems" dalam *Al-Jami'ah*, No. 4 Th. XI Djuli 1970 hal.55.
- Rasjidi, 1967, *Pidato Sambutan Musyawarah Antar Agama dalam Majalah Al-Djami'ah*, Nomor Khusus, Mei 1968.

Internet :

- Halim, A. 2008. *Menggali Oase Toleransi*, diakses melalui; <http://anselboto.blogspot.com/2008/04/menggali-oase-toleransi.html>, pada tanggal, 29 Januari 2010.
- Nana, P. 2007, *Serba-serbi Kehidupan BerAgama*, diakses melalui <http://www.mail-archive.com/ppiinmereka@yahoogroups.com/msg55541.html>, pada tanggal, 27 Januari 2010).

Peraturan :

- SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 16 Tahun 2004.
- Ketetapan BKSAUA Sulut Nomor: 05/BKSAUA/ sulut/ 2005
- Handouts* BKSAUA Sulawesi Utara. 2007.